

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD merupakan salah satu OPD yang membantu tugas Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemerintahan umum dengan fungsi koordinasi, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas pimpinan dan anggota DPRD.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat DPRD secara teknis membantu kelancaran tugas pimpinan dan anggota DPRD, dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam memberikan pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, tugas sekretariat DPRD Kabupaten Pati dituntut semakin cepat, tepat serta mampu meletakkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara tegas dengan bertambahnya dinamika administrasi pemerintahan dan politik yang ada,

Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat Strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh-pengaruh yang mengelilingi dan mempengaruhi perkembangan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Secara terstruktur, lingkungan Strategis dimaksud berupa lingkungan internal organisasi yang terdiri atas dua faktor Strategis, yaitu kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness), serta berupa lingkungan eksternal organisasi yang

terdiri atas dua faktor Strategis, yaitu peluang (opportunity) dan ancaman/tantangan (threath).

Berdasarkan analisis identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Pati diatas, maka secara normatif, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, disamping menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, permasalahan pokok yang dihadapi antara lain :

- 1) Perluasan jenis layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik yang responsif berbasis Teknologi Informasi (E-Goverment);
- 2) Isu transparansi perencanaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan berbasis TI dengan data yang andal dan terbarukan.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi bupati – wakil bupati terpilih Tahun 2017-2022, ditetapkan sebagai visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pati Tahun 2017–2022 adalah:

“MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PELAYANAN PUBLIK”

Visi tersebut memuat dua unsur fokus cita-cita, yaitu:
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatnya pelayanan publik.

Dalam rangka pencapaian Visi tersebut maka telah ditetapkan Misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal;

- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan;
- c. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan;
- d. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik;
- e. Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja;
- f. Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri.
- g. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, mendukung pengembangan ekonomi daerah.
- h. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan

Seiring tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD yang merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, maka dalam RPJMD Kabupaten Pati 2017–2022 merupakan salah satu OPD pelaksana Misi Keempat yaitu : “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik” dan sasaran RPJMD “Meningkatnya peran DPRD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya” yang akan dilaksanakan melalui program – program SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Pati sebagai berikut:

Program Utama : 1. “Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan ;

2. Program Penataan peraturan Perundang-undangan”.

Program Penunjang :

1) Program Administrasi Perkantoran;

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;

Adapun indikator kinerja utama terkait visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih adalah “ Prosentase Kegiatan DPRD yang dipublikasikan, Fasilitasi kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang Legislasi, Anggaran dan Pengawasan, Prosentase Rapat yang terlaksana sesuai jadwal, dan Prosentase Pembahasan Raperda oleh Dewan yang tepat waktu serta Prosentase penyelesaian Raperda” dalam kurun waktu 5 tahun.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dirumuskan pada Tabel 3.1, sedangkan Pemetaan Permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dituangkan dalam Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.1

FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG PELAYANAN OPD TERHADAP
PENCAPAIAN VISI MISI PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

No	Misi KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
Misi 4 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik				
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD yang belum optimal	Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah	Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD
2.	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Masih seringnya terjadi campur tangan pihak-pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD	Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia	Masih adanya opini terhadap institusi Sekretariat DPRD sebagai organisasi yang interior	Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Struktur organisasi Sekretariat DPRD yang belum mengakomodasi secara optimal fungsi-fungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi	Masih banyaknya hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat	Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti dengan peningkatan aksesibilitasnya

		dalam rangka mendukung kinerja DPRD	DPRD	
5.	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian Kinerja Keuangan	Masih rendahnya kualitas laporan kinerja SKPD	Belum optimalnya kinerja pengelola keuangan Set. DPRD	Dimungkinkannya pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD
6.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Belum optimalnya DPRD melaksanakan tupoksi	Pengaruh eksternal terhadap pelaksanaan tupoksi	Perlu melakukan koordinasi untuk meningkatkan kualitas DPRD
7.	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Belum optimalnya peran DPRD dalam penataan produk hokum	Lemahnya penegakan produk hukum daerah oleh aparat.	Perlu peningkatan kinerja badan pembentukan perda

Tabel 3.2

PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
1	<p>1) Perluasan jenis layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik yang responsif berbasis Teknologi Informasi (E-Government);</p> <p>2) Isu transparansi perencanaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan berbasis TI dengan data yang andal dan terbarukan.</p>	1. Belum optimalnya kinerja DPRD yang dipublikasikan.	<p>1. Belum optimalnya peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;</p> <p>2. Belum Optimalnyya penataan peraturan perundang-undnagan.</p>

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra DPRD Provinsi

Mengingat tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati sebagai unit penunjang dan pelayanan administratif maka sasaran program yang tertuang dalam Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra OPD dapat terlaksana dengan baik dan saling melengkapi satu sama yang lain.

Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra OPD dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra OPD terhadap sasaran Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra DPRD Provinsi tersebut sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsi masing-masing OPD.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten dalam bidang perencanaan pembangunan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka Sekretariat DPRD menjalankan tugas dalam bidang Pemerintahan Umum yang lebih khusus mengatur dan mengurus urusan pemerintahan.

Dengan kewenangan tersebut, maka penyelenggaraan tata cara dan tahapan perencanaan daerah yang mencakup proses perencanaan dilakukan pada masing-masing lingkup pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota). Dikarenakan Sekretariat DPRD bukan merupakan lembaga teknis daerah, maka sasaran jangka menengah dari rencana strategis kementerian dan Provinsi tidak secara langsung berkaitan.

Masing-masing lembaga perencana baik ditingkat pusat maupun Provinsi melakukan perencanaan pembangunan di lingkup kewenangannya masing-masing, namun harus sesuai dengan prinsip perencanaan karena merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaah RTRW Kabupaten Pati yang dimaksudkan adalah identifikasi faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati ditinjau dari implikasi RTRW. Mengingat tupoksi Sekretariat DPRD memiliki tugas utama terkait dengan tugas menyelenggarakan administrasi Kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan maka tidak banyak berpengaruh atau sebaliknya tidak terpengaruh oleh RTRW.

Demikian pula yang terkait dengan pengelolaan atau optimalisasi pemanfaatan aset daerah juga tidak banyak terpengaruh atau mempengaruhi RTRW. Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dalam melaksanakan hak dan fungsinya tidak banyak berpengaruh langsung atau sebaliknya tidak terpengaruh oleh KLHS. Demikian pula yang terkait dengan pengelolaan atau optimalisasi pemanfaatan aset daerah juga tidak banyak terpengaruh atau mempengaruhi KLHS. Dalam dokumen KLHS

tidak ditemui program Sekretariat DPRD yang memberikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Perencanaan dan penetapan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup yang menjadi keharusan dalam pembangunan daerah perlu dipahami dan ditaati oleh segenap masyarakat sehingga perlu disosialisasikan oleh Dewan secara berkesinambungan agar tata ruang, kerusakan dan pencemaran lingkungan dapat dikendalikan. Dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang agar terjadi sinkronisasi dan harmonisasi antara fisik dan non fisik perkotaan termasuk menjamin daya tampung dan daya dukung lingkungan, sehingga Kabupaten Pati selalu menjadi daerah yang nyaman. Hal ini diwujudkan keindahan dan kenyamanan serta penghijauan di lingkungan kantor Sekretariat dan lembaga DPRD. Sedangkan program dan kegiatan tidak ada yang berkaitan langsung terhadap perubahan lingkungan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah informasi-informasi, kejadian-kejadian, fenomena-fenomena terkini yang memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi. Isu-isu strategis merupakan faktor-faktor internal maupun eksternal yang eksistensinya mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja. Kajian lingkungan banyak menghasilkan banyak isu, tetapi perencanaan strategis menganjurkan agar tidak semua isu perlu diatasi, karena kita perlu mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang ada.

Identifikasi terhadap lingkungan Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pati menghasilkan faktor-faktor Strategis sebagai berikut:

A. Faktor Internal

1. Kekuatan :

- a. Tersedianya anggaran operasional yang cukup.
- b. Tersedianya Tata Tertib DPRD berdasarkan Peraturan DPRD tersebut sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.
- c. Terjalannya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD.
- d. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup.
- e. Kedudukan Sekretariat DPRD lebih strategis dengan ditetapkannya Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Kelemahan :

- a. Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD yang belum optimal
- b. Belum optimalnya pemanfaatan ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- c. Struktur organisasi Sekretariat DPRD yang belum mengakomodasi secara optimal fungsi-fungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja DPRD.

B. Faktor Eksternal

1. Peluang :

- a. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD.

- b. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis
- c. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan
- d. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti kemampuan sumber daya aparatur,
- e. Pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD.

2. Ancaman/Tantangan :

- a. Seringnya terjadi perubahan Peraturan Perundangan terkait dengan pelaksanaan tugas instansi pemerintah.
- b. Masih seringnya terjadi campur tangan pihak-pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD
- c. Masih banyaknya hambatan – hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRD.

C. Pilihan Langkah Strategis

Langkah Strategis S–O

1. Penuhi tuntutan standar kinerja DPRD yang semakin tinggi melalui optimalisasi fungsi Sekretariat DPRD, pemanfaatan anggaran, sarana dan prasarana yang tersedia serta pemanfaatan perkembangan iptek dan tenaga ahli.
2. Manfaatkan hubungan harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD, dan adanya tata tertib DPRD untuk mewujudkan pelayanan terhadap Anggota DPRD serta penyaluran aspirasi masyarakat secara prima.

Langkah Strategis S-T

1. Jadikan keberadaan Tata Tertib serta terjalinnya hubungan yang harmoni antara Sekretariat DPRD dengan DPRD sebagai wahana untuk mengatasi masih seringnya campur tangan pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal dan untuk perwaju dan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRD;
2. Optimalkan kedudukan Sekretariat DPRD yang strategis untuk mengantisipasi seringnya terjadi perubahan kebijakan baik secara Regional dan nasional.

Langkah Strategis W- O

1. Tingkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Optimalkan ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan.

Langkah Strategis S-W

1. Tingkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel dibidangnya;
2. Optimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mengantisipasi hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh.

D. Faktor- faktor Kunci keberhasilan

Faktor-faktor kunci keberhasilan merupakan faktor-faktor yang sangat penting dalam mewujudkan keberhasilan mencapai tujuan dan sasaran organisasi, dan bahkan perumusan tujuan organisasi haruslah memperhatikan keberadaan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut. Faktor-faktor kunci keberhasilan ini ditetapkan dengan terlebih dahulu dengan menganalisis lingkungan Strategis organisasi melalui pendekatan analisis SWOT.

Dengan mempergunakan pendekatan analisis SWOT terhadap faktor-faktor Strategis tersebut, maka dapat ditetapkan faktor-faktor kunci keberhasilan upaya pencapaian tujuan dan sasaran dari Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah; untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan ; dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh.

Berikut ini disajikan Review Isu-Isu Pelayanan Sekretariat DPRD Kab. Pati terhadap Visi-misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagaimana Tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3
 REVIEW ISU-ISU PELAYANAN OPD TERHADAP VISI MISI
 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

NO	ASPEK YANG DIREVIEW	URAIAN PROGRAM	ISU-ISU
1	2	3	4
1	Belum optimalnya DPRD Kabupaten Pati dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya guna mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan SDM yang kompeten.	1. Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 2. Penataan Peraturan Perundang-undangan	1. Penguatan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 2. Penataan Peraturan perundang-undangan dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh.